

EFEKTIVITAS APLIKASI KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP) DALAM VALIDASI PENGELOLAAN DATA BUKU TANAH DI KANTOR BPN KABUPATEN KOLAKA

¹Alfiddah Nurfadillah, ²Nursamsir, ³Mardiana

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
 email: ¹alfiddahnf201@gmail.com, ²nursamsir67@gmail.com,
³diana.usnkolaka@gmail.com

Abstract

The main objective of this research is to analyze the effectiveness of the use of the Computerized Land Activities (KKP) Application in supporting the validation of land book data management at the Kolaka Regency National Land Agency (BPN) Office. This research uses a qualitative approach with descriptive methods, through data collection techniques such as field observations, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the KKP application is quite effective in improving the efficiency and regularity of land book data management. This is evident in the acceleration of the validation process, reduced service time, and ease of real-time data access by officers. However, several obstacles remain, such as network disruptions, limited integration with external agencies, and less than optimal training and employee adaptation to the digital system. Furthermore, not all data is fully digitized, particularly old certificates that are still in manual form. Nevertheless, the KKP application has had a positive impact on the land administration process at the Kolaka BPN, particularly in creating transparency and accountability in services. Therefore, with continuous improvements to infrastructure and human resources, the effectiveness of this application has the potential to be increased from moderately effective to very effective in the future.

Keywords: *Effectiveness; Management; Land Book*

Abstrak

Tujuan utama dari riset ini yakni guna mengkaji sejauh mana efektivitas penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dalam menunjang validasi pengelolaan data buku tanah di Kantor BPN Kabupaten Kolaka. Riset ini memakai pendekatan kualitatif dengan cara deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Capaian riset menunjukkan bahwa implementasi aplikasi KKP tergolong cukup efektif dalam meningkatkan efisiensi dan keteraturan pengelolaan data buku tanah. Hal ini terlihat dari percepatan proses validasi, pengurangan waktu pelayanan, serta kemudahan dalam mengakses data secara real-time oleh petugas. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan integrasi dengan instansi eksternal, serta belum maksimalnya pelatihan dan adaptasi pegawai terhadap sistem digital. Selain itu, tidak semua data terdigitalisasi sepenuhnya, khususnya sertifikat lama yang masih dalam bentuk manual. Meskipun demikian, aplikasi KKP telah memberikan dampak positif terhadap proses administrasi pertanahan di BPN Kolaka, terutama dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas layanan. Oleh karena itu, dengan perbaikan berkelanjutan terhadap infrastruktur dan sumber daya manusia, efektivitas aplikasi ini berpotensi ditingkatkan dari cukup efektif menjadi sangat efektif di masa mendatang.

Kata kunci: *Efektivitas; Pengelolaan; Buku Tanah*

PENDAHULUAN

Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi pemerintah non-kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan urusan pertanahan. Lembaga ini berperan sebagai pelaksana kebijakan negara di sektor pertanahan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. ATR/BPN memiliki mandat untuk mengelola urusan agraria, tata ruang, serta pertanahan di tingkat nasional guna mendukung kelancaran administrasi pemerintahan (Iskandar et al., 2019). badan pertanahan nasional republic Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan tahun 2015 dan Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik

Aplikasi KKP dalam validasi Pengelolaan data buku tanah yang beroperasi sejak tahun 2020 di kantor pertanahan kabupaten kolaka, menjadi tantangan signifikan yang masih dihadapi dalam proses elektronifikasi buku tanah. Dengan jumlah buku tanah yang valid meningkat dari 97.926 pada tahun 2021 menjadi 104.404 pada tahun 2023, dan proyeksi mencapai 114.453 pada tahun 2024, menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan data. Namun, persentase buku tanah yang siap untuk diubah menjadi format elektronik masih tergolong rendah, meskipun meningkat dari 36,66% pada tahun 2021 menjadi 48,36% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan validitas data, kesiapan untuk transisi ke sistem elektronik masih memerlukan perhatian serius. Keterlambatan dalam elektronifikasi dapat mengakibatkan kesulitan dalam akses informasi, meningkatkan risiko kesalahan data, dan menghambat efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih efektif dan terintegrasi guna mempercepat proses elektronifikasi buku tanah, termasuk pelatihan bagi staf, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua buku tanah dapat dikelola secara elektronik dengan validitas yang tinggi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi didalam efektivitas aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) dalam validasi pengelolaan data buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka adalah kendala jaringan yang sering terjadi, terutama saat proses maintenance. Ketika jaringan mengalami gangguan, akses terhadap aplikasi menjadi terhambat, yang berdampak pada keterlambatan dalam pengolahan dan validasi data tanah. Hal ini tidak hanya mengganggu alur kerja petugas, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan administrasi di kemudian hari.

Menurut Gibson (2011:32), efektivitas merujuk pada sejauh mana sasaran atau tujuan berhasil direalisasikan, di mana tingkat keberhasilan pencapaian tersebut mencerminkan tingkat efektivitasnya. Sementara itu, Hidayat (1986) menyatakan bahwa efektivitas merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu sasaran—baik dalam hal jumlah, mutu, maupun waktu—telah direalisasikan. Makin tinggi persentase pencapaian terhadap target yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas yang diperoleh. Hal serupa juga ditegaskan oleh Rosyad et al. (2023) yang mengutip Hidayat, bahwa efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai secara optimal berdasarkan standar tertentu.

Sedangkan Duncan sebagaimana dikutip oleh Steers (1985:53) dalam karyanya yang berjudul *"Efektivitas Organisasi"*, mengemukakan beberapa indikator dalam menilai efektivitas, yakni:

1. Pencapaian Sasaran: Proses pencapaian tujuan dianggap sebagai suatu rangkaian usaha secara menyeluruh dalam menggapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Keselarasan Internal: Merupakan proses pengukuran sejauh mana suatu entitas mampu membangun hubungan sosial, menyatukan kesepahaman, serta menjalin komunikasi dengan berbagai institusi atau kelompok eksternal lainnya.
3. Kemampuan Beradaptasi: Menggambarkan kapabilitas suatu organisasi dalam menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri terhadap kondisi eksternal yang terus berkembang (HERMAWAN, 2009).

Menurut Hartono (2013:20), Sistem Informasi Manajemen dapat diartikan sebagai suatu tatanan sistematis yang terdiri atas sejumlah elemen yang saling terintegrasi dan berfungsi secara kolektif untuk menghasilkan data yang relevan bagi kebutuhan pengelolaan perusahaan. Selain itu, Davis (1995) juga menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem informasi yang tidak hanya bertugas memproses transaksi-transaksi penting dalam sebuah organisasi, tetapi juga memberikan dukungan informasi serta pengolahan data yang dibutuhkan dalam proses manajerial dan pengambilan keputusan (Kustanto & Chernovita, 2021).

Berdasarkan pendapat Jogyanto H.M, pengelolaan data merujuk pada proses pemrosesan data menjadi bentuk yang memiliki nilai guna lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengolahan data merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan input berupa data mentah yang kemudian diubah menjadi informasi yang bernilai dan relevan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kosanke, 2020).

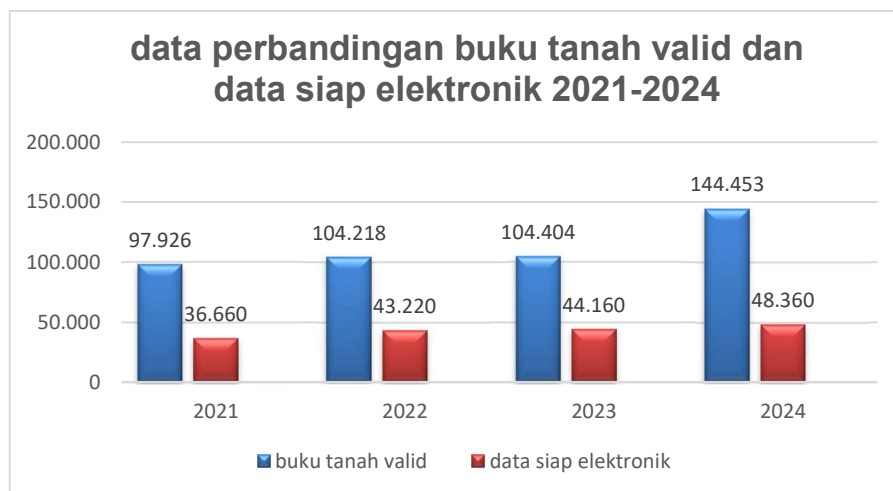
METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan riset pendekatan kualitatif deskriptif. Informan terdiri atas kepala kantor BPN kolaka, seksi penetapan hak dan pendaftaran, dan pegawai bpn kolaka. Cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kasus, analisis dokumen sekaligus dokumentasi yang telah di analisis menggunakan analisis merujuk kepada Miles dan Huberman dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sekaligus penarikan simpulan. Lokasi riset berlangsung di kantor BPN kabupaten kolaka. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kondisi yang ada dan ketersediaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) adalah sebuah sistem digital yang ditingkatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari strategi digitalisasi pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Aplikasi ini bertujuan untuk menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan di kantor-kantor pertanahan, dan memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, serta akuntabel kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini, kegiatan seperti pendaftaran tanah, peralihan hak, pengecekan sertifikat, validasi data buku tanah, dan berbagai bentuk pelayanan pertanahan lainnya, dapat dilakukan secara terintegrasi dan terdokumentasi secara elektronik., aplikasi kkp di dukung dengan kebijakan yaitu surat edaran tentang penggunaan aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan tahun 2015 dan Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.

Berikut data jumlah buku tanah yang valid dan data siap elektronik yang proses pengimputannya menggunakan aplikasi KKP:



(sumber: BPN kabupaten kolaka)

Berdasarkan data diagram diatas menunjukkan perbandingan jumlah buku tanah valid dan data siap elektronik dari tahun 2021 hingga 2024 data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah buku tanah valid terus mengalami peningkatan bahwa setiap tahunnya dari 97.926 pada tahun 2021 dan menjadi 144.453 pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah data siap elektronik juga meningkat, namun pertumbuhannya tidak secepat buku tanah valid, yakni dari 36.660 pada tahun 2021 menjadi 48.360 pada tahun 2024. Perbedaan yang cukup besar antara jumlah buku tanah valid dan data siap elektronik, khususnya pada tahun 2024, menunjukkan bahwa meskipun proses validasi data berjalan dengan baik, proses digitalisasi atau transformasi data ke bentuk elektronik belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan masih adanya hambatan atau keterbatasan dalam kesiapan infrastruktur maupun proses konversi data ke dalam format digital.

Efektivitas aplikasi KKP dalam lingkungan petanahan ditinjau dari 3 (tiga) indikator menurut duncan yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Dalam model efektivitas organisasi menurut Duncan, pencapaian tujuan merupakan indikator utama yang menilai sejauh mana system atau organisasi berhasil merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan yang telah di tetapkan. Dalam konteks penggunaan aplikasi digitalisasi aktivitas pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka menunjukkan dampak signifikan terhadap layanan. Implementasi sistem aplikasi KKP mengacu pada regulasi resmi BPN RI tahun 2015, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pertanahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan, serta memperkuat integritas lembaga dan memperbaiki citra kementerian ATR/BPN sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai anti-korupsi, modernisasi layanan dan tata kelola agraria, tata ruang dan pertanahan. Hal ini sejaln dengan fungsi dan peran sistem informasi dalam organisasi yang dikemukakan oleh O'brien & Marakas (2011) Guna menunjang proses penentuan kebijakan pada tingkat manajerial puncak, sistem ini juga berperan dalam memfasilitasi fungsi pengendalian, mendukung proses analisis isu-isu yang muncul, serta mereduksi kerumitan aturan organisasi agar lebih mudah dipahami. Selain itu, sistem ini turut berkontribusi dalam pengembangan inovasi produk di tingkat pelaksan. Dalam hal penerapan aplikasi KKP sistem informasi yang berbasis teknologi ini telah membantu memudahkan dalam hal penyederhanaan proses pembuatan atau mendataan administrasi pertanahan di kantor bpn kolaka.

Data penelitian menunjukkan terjadi peningkatan luaran administrasi pertanahan dalam bentuk percetakan buku tanah valid dan data valid elektronik 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SIM dalam sebuah organisasi dalam hal ini BPN kolaka telah

berjalan dan menghasilkan informasi yang akurat dalam bentuk dokumentasinya data-data pertanahan secara elektronik.

Dalam prosesnya efektivitas penerapan KKP dikatakan cukup efektif dalam mencapai tujuan dimana tujuannya adalah mempermudah validasi dan mengelola data buku tanah dan menciptakan keteraturan serta mempermudah proses administrasi hal ini sejalan dengan konsep yang di kemukakan oleh Gibson (2011:32) yakni efektivitas yaitu tercapainya tujuan yang sudah disepakati atas usaha bersama, dimana tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Meskipun ada beberapa kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan akses aplikasi melalui LAN, serta masih banyak data sertifikat tanah yang sudah lama belum terdigitalisasi secara menyeluruh, namun aplikasi tetap mampu mempercepat proses validasi dan membantu pegawai dalam menjalankan tugasnya secara lebih sistematis dan efisien.

2. Integrasi

Indikator kedua dalam model Duncan adalah integrasi, yang merujuk pada kemampuan system atau organisasi dalam membangun keterhubungan dan koordinasi antar bagian atau unit dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi KKP telah menunjukkan tingkat integrasi yang cukup efektif, khususnya dalam konteks internal kantor pertanahan Kolaka. Di lingkungan internal, aplikasi ini telah membentuk system database terpusat yang memungkinkan bidang-bidang seperti survey dan pemetaan, penetapan hak, serta pengukuran untuk saling mengakses data secara real-time sesuai dengan otoritas masing-masing.

Berdasarkan hasil pembahasan, aplikasi KKP menunjukkan tingkat integrasi internal yang cukup baik di lingkungan kantor pertanahan kabupaten Kolaka, terutama dalam penggunaan sistem database terpusat yang memungkinkan berbagai bidang seperti survei dan pemetaan, penetapan hak, dan pengukuran untuk saling berbagi data secara real time. Hal ini selaras dengan teori sistem informasi manajemen yang di kemukakan McLeod & Schell yaitu dimana SIM berfungsi guna menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan dan koordinasi antar bagian organisasi. Sistem yang terkomputerisasi ini memungkinkan setiap bagian organisasi untuk memperoleh data yang sama, mengurangi redundansi, dan meningkatkan efisiensi kerja.

Lebih lanjut menurut Robbins (2008) dalam pendekatan sistem, efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari pencapaian tujuan, tetapi juga dari bagaimana organisasi mampu menjaga hubungan antara bagian internal serta responsif terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, meskipun integrasi eksternal aplikasi KKP masih terbatas, namun integrasi internal telah berjalan cukup efektif melalui mekanisme kerja yang terkonsolidasi dan sosialisasi internal melalui workshop.

Meskipun aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) sistem internal yang digunakan oleh pegawai BPN, namun bentuk sosialisasi eksternal terhadap program-program yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan tetap dilakukan melalui media sosial dan saluran resmi. Salah satu media yang sering digunakan adalah Instagram resmi kantor BPN, yang di gunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, inovasi digital, serta edukasi kepada masyarakat mengenai layanan pertanahan. Selain Instagram sosialisasi juga dilakukan melalui website resmi kementerian ATR/BPN, serta platform digital lainnya.

3. Adaptasi

Dalam teori efektivitas menurut Duncan, adaptasi merupakan indikator penting yang mengukur kemampuan organisasi guna merespons dan menyesuaikan diri kepada perubahan internal maupun eksternal guna menjaga kelangsungan dan efektivitas operasionalnya. Adaptasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup penyesuaian teknis terhadap sistem baru, tetapi juga perubahan nilai, sikap, dan budaya organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa proses adaptasi terhadap penggunaan aplikasi KKP belum berjalan dengan efektif. Walaupun sebagian pegawai yang memiliki literasi digital tinggi mampu menyesuaikan diri secara cepat, mayoritas lainnya mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi, terutama karena kurangnya pelatihan formal dan tidak adanya pendampingan teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada operator tertentu, memperlambat proses validasi, serta menciptakan beban kerja yang tidak merata.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan potensi penyimpangan prosedur seperti percepatan penyelesaian berkas karena adanya pemberian imbalan dari pemohon. Praktik ini terjadi bukan karena celah dalam sistem KKP, tetapi lebih disebabkan oleh tingginya beban kerja, keterbatasan jumlah petugas, dan desakan dari pemohon itu sendiri. Dalam beberapa kasus, pemohon menawarkan imbalan agar berkasnya diprioritaskan, sehingga menimbulkan praktik yang menyimpang dari standar prosedur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara sistem, aplikasi KKP telah dirancang untuk mencegah pungli, namun penguatan pengawasan dan manajemen sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan berbasis integritas dan reformasi budaya kerja yang lebih kuat agar adaptasi terhadap sistem elektronik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan perilaku kerja yang profesional dan transparan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai efektivitas aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kantor BPN Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa secara umum aplikasi ini cukup efektif dalam memvalidasi dan mengelola data buku tanah. Efektivitas terlihat jelas pada aspek pencapaian tujuan, di mana aplikasi mampu mempercepat proses validasi dan meningkatkan keteraturan administrasi. Pada aspek integrasi, aplikasi telah membentuk sistem database terpusat yang memungkinkan koordinasi antarbidang berjalan baik, meskipun integrasi dengan instansi luar masih terbatas. Namun, pada aspek adaptasi, efektivitas belum tercapai karena masih banyak pegawai yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi akibat kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis. Oleh karena itu, agar aplikasi KKP dapat berjalan optimal, perlu dilakukan penguatan adaptasi, pelatihan SDM, serta pembenahan budaya kerja secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas November Kolaka, atas segala dalam bentuk dukungan, fasilitas yang telah diberikan selama proses penelitian dan penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, K., Nurhayati, Arafat, & Hatchi, I. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian*. PT Media Penerbit Indonesia Royal.
- HERMAWAN, H. (2009). 6%. 1% 93%. *Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*, 150–167.
- Iskandar, D., Janah, S. M., & Syaifudin, A. (2019). Aplikasi Komputerisasi Loc (Land Office Computerization) Pada Badan Petahanan Nasional Untuk Kualitas Pelayanan Sertifikasi Pertahanan Computerized. *Incomtech Program Studi Manajemen Informatika, Fakultas Saint Dan Teknologi Universias Raharja*, 8(2), 63–68.
- Ivory, agustina raffel. (2024). *BUKU PANDUAN VALIDASI DIGITAL BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM*.
- Kosanke, R. M. (2020). *Pegelolaan data*. 15–25.

- Kustanto, G. E. A., & Chernovita, H. P. (2021). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Studi Kasus : PT Unicorn Intertranz. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(4), 719. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2021844849>
- Nur Amrin, R. (2023). Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi. *Jurnal Pertanahan*, 13(1), 1–16.
- Pradipta, W., & Rani, U. (2020). Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(2), 173–181. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1659>
- Rosyad, M. N., Ati, N. U., & Putra, L. R. (2023). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA MELALUI APLIKASI MALANG DATA INOVASI DALAM MENINGKATKAN INDEKS INOVASI DAERAH PADA INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (Studi Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 17(6), 96–105.
- Rosyari, F. R., Nurdin, N., & Karunia, R. L. (2024). Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 6(1), 55–75.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020-2024.
- Surat Edaran BPN RI Tentang Penggunaan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Tahun 2015.
- Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.